

Analisis Anak Berkebutuhan Khusus, Identifikasi Dan Implementasi Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Kabupaten Bungo

Zikrillah Zikrillah

Fakultas Pendidikan Dan Keguruan Universitas Muahammadiyah Muara Bungo

Email : elzikrie2154@gmail.com

Erwin Gunawan

Fakultas Pendidikan Dan Keguruan Universitas Muahammadiyah Muara Bungo

Email : erwingunawan2001@gmail.com

Opi Andriani

Fakultas Pendidikan Dan Keguruan Universitas Muahammadiyah Muara Bungo

Email : opi.adr@gmail.com

Abstract. *This research aims to describe the identification and implementation of inclusive education for Children with Special Needs (ABK) in elementary schools in Bungo Regency. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection was carried out through direct observation and interviews with participants. The subjects of this research were elementary school teachers in Bungo Regency, which consists of five districts or cities totaling 15 elementary schools. The results of the research findings include: (1) the disorders of students with special needs in 8 elementary schools spread across Bungo Regency are relatively the same, namely slow learning and mild mental impairment, (2) the implementation of inclusive education in elementary schools in Bungo Regency is not going well, and (3) obstacles to the implementation of inclusive education are the lack of facilities and infrastructure owned by schools and the costs for providing inclusive education facilities are relatively small, teachers' understanding of students with special needs is still very minimal.*

Keywords: *Inclusive Education, Children with Special Needs*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan identifikasi dan pelaksanaan pendidikan inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) disekolah dasar Kabupaten Bungo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan partisipan. Subjek penelitian ini adalah guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Bungo yang terdiri dari berjumlah 8 sekolah dasar. Hasil temuan penelitian antara lain: (1) kelainan yang dimiliki peserta didik berkebutuhan khusus di 8 sekolah dasar yang tersebar di Kabupaten Bungo relatif sama yaitu lamban belajar dan tuna grahita ringan, (2) penyelenggaraan pendidikan inklusi disekolah dasar Kabupaten Bungo kurang berjalan dengan baik, dan (3) kendala implemetasi pendidikan inklusi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah serta biaya untuk pengadaan sarana pendidikan inklusi relatif sedikit, pemahaman guru terhadap peserta didik berkebutuhan khusus masih sangat minim.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusi, Anak Berkebutuhan Khusus

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar untuk semua individu dan fondasi untuk pembelajaran seumur hidup. Melalui ilmu pengetahuan diharapkan individu mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga dapat bersaing dalam masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan semua individu memperoleh pendidikan yang layak, termasuk untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Selama ini anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan yang sesuai dengan kelainannya yaitu di Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak langsung hal ini telah mendiskriminasi anak berkebutuhan khusus, akibatnya menghambat proses saling

mengenal antara anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus. Dampaknya anak berkebutuhan khusus menjadi tersingkirkan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Untuk mewujudkan interaksi dan pemenuhan hak belajar semua anak serta dapat merangkul keberagaman, maka bagi seluruh anak di Indonesia maka muncullah konsep pendidikan inklusi (Rasmitadila, 2020). Menurut Anjarsari (2018), pendidikan inklusi merupakan suatu Pendidikan yang menerima semua peserta didik dengan kebutuhan khusus di sekolah reguler yang berlokasi di daerah tempat tinggal mereka dan mendapatkan berbagai pelayanan pendukung dan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan inklusif juga dapat didefinisikan sebagai proses, filosofi, dan praktek pendidikan (Zabeli, Shehu, & Anderson, 2020). Pendidikan inklusif melibatkan gagasan tentang bagaimana pendidikan dan sekolah harus diatur (Mieghem, Verschueren, Petry, & Struyf, 2018). Inklusi sangat bergantung pada sikap guru terhadap peserta didik (Saloviita, 2020).

Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 menyatakan bahwa pendidikan inklusif merupakan penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan serta potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Taufan & Mazhud, 2014). Undang-undang di atas menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapat pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya. Artinya, sekolah inklusif adalah sekolah umum yang mengakomodasi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, atau kondisi lain mereka. Sekolah inklusif sebagai sarana yang ditujukan untuk menanggapi berbagai kebutuhan dari semua peserta didik baik umum maupun berkebutuhan khusus melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya, dan masyarakat. Pendidikan inklusif diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan seperti peserta didik lainnya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, diperoleh data bahwa sekitar 241 sekolah dasar Negeri dan 227 Sekolah Dasar Swasta Kabupaten Bungo (Dapodik Kab. Bungo : 2023). Sejalan dengan surat edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Nomor 380/C.C6/MN/2003 yakni setiap kabupaten atau kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusi sekurang-kurangnya 4 sekolah setiap jenjangnya (Husen, 2018). Hal ini menjelaskan bahwa propinsi Kabupaten Bungo sudah menyelenggarakan pendidikan inklusi, hanya saja ABK yang belajar di sekolah inklusi belum teridentifikasi secara keseluruhan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 129 ayat (3), peserta didik yang berkelainan terdiri dari tunanetra, tunarungu, tunawicara,

tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, dan menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat dan zat aditif lain (Rasmitadila, 2020).

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) untuk mengidentifikasi keberadaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan jenis ketunaannya di Sekolah Dasar (SD) penyelenggara pendidikan inklusi di Kabupaten Bungo, (2) untuk memaparkan implementasi pendidikan inklusi sekolah dasar di Kabupaten Bungo, dan (3) untuk mengidentifikasi kendala dalam implementasi pendidikan inklusi di Kabupaten Bungo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi di Kabupaten Bungo yang berjumlah 241 sekolah dasar Negeri dan 227 Sekolah Dasar Swasta (Dapodik Kabupaten Bungo:2023). Namun, yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 8 sekolah dasar. Teknik pengambilan sampel adalah nonprobability sampling dengan cara purposive sampling yaitu memilih sekolah yang teridentifikasi keberadaan ABK. Instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung dan wawancara. Observasi langsung dilakukan dengan teknik partisipan yaitu peneliti langsung mengobservasi keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah dan guru kelas yang didalam kelasnya terdapat anak berkebutuhan khusus. Teknik analisis data dilakukan adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan langkahtriangulasi. Triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi sumber (Nazir, 2009).

HASIL

Data dalam penelitian ini diperoleh dari 50 sekolah dasar negeri dan swasta yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Kabupaten Bungo. Rincian perolehan data dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Daftar Nama Sekolah dan Kelainan Anak Berkebutuhan Khusus di kabupaten Bungo

Nama Sekolah	Kelas	Jenis Kelainan	Jumlah
SDN NO 031/ II Mangun Jayo	1, 4, 5	Slow Learner, cacat Fisik	5 Orang
SDN 219 BTN Lintas Asri	4	Slow Learner	2 Orang
SD 101 Ma.Bungo	3	Slow Learner	2 Orang

Nama Sekolah	Kelas	Jenis Kelainan	Jumlah
SDN 197/II Pulau Pekan	5	Sumbing/ tunawicara	1 Orang
SDN 131 SKB	3	Cacat/ pendek	1 Orang
SDN 126/II Tanjung Agung	1, 3, 4	Slow Learner	4 Orang
SDN 149 Tanah Bekali	2	Bisu	1 Orang
SDN 079/ II Baru Pusat Jalo	4	Tunawicara	Orang

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan tidak terdapat variasi kelainan yang dialami peserta didik. Jenis kelainan yang dialami dominan lamban belajar dan tunawicara yang mengakibatkan mereka kesulitan memahami pelajaran di sekolah.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas mengenai proses pembelajaran diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Persentase Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah dan Guru.

Indikator Pertanyaan	Persentase
Penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah reguler	96
Kesiapan guru dalam mengajar peserta didik berkebutuhan khusus	76
Mengikuti pelatihan/workshop pendidikan inklusi	72
Dukungan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah reguler	92
Dukungan dari kepala sekolah program pendidikan inklusi	90
Apakah sama RPP yang dirancang untuk peserta didik berkebutuhan khusus	80
Penempatan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas	100
Apakah metode pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus sama dengan reguler	50
Upaya pemerintah untuk menyukseskan pendidikan inklusi	96
Kelengkapan saran dan prasarana yang dimiliki	45
Alokasi dana untuk pendidikan inklusi	56

PEMBAHASAN

Identifikasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Kabupaten Bungo

Berdasarkan data di tabel 1 yang diperoleh dari responden tentang peserta didik berkebutuhan khusus di berbagai sekolah inklusi di Kabupaten Bungo dapat dilihat jenis kelainan pada peserta didik berkebutuhan khusus relatif sama yaitu lamban belajar dan tuna grahita ringan. Ditinjau dari proses pembelajaran, sebaiknya guru melakukan suatu modifikasi baik dari aspek materi maupun metode pembelajaran yang digunakan. Hal ini sejalan dengan

pendapat Riadin, Misyanto, & Usop (2017) yang menyatakan bahwa kesulitan belajar yang dialami bisa menyebabkan peserta didik mengalami kebingungan menjawab tugas.

Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah dasar diantaranya klaster kelas inklusi, sumber daya manusia (guru kelas dan guru pendamping khusus), perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, evaluasi, sarana dan prasarana, dan sebagainya (Harahap & Hastina, 2017). Namun, dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada kesiapan guru dalam mengajar anak berkebutuhan khusus serta anak normal, sarana dan prasarana, perencanaan pembelajaran, dan pembagian kelas untuk ABK. Berdasarkan wawancara dengan guru, untuk mengetahui kesiapan guru dalam mengajar ABK di kelas normal diperoleh hasil 76% guru belum siap sepenuhnya mengajar ABK. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman guru terhadap ABK serta kemampuan yang dimilikinya. Pratiwi (2015) menambahkan bahwa terjadi penolakan dari guru dan lemahnya dukungan terhadap anak berkebutuhan khusus disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan guru tentang anak kebutuhan khusus. Hal ini karena latar belakang pendidikan yang tidak memberikan bekal kepada guru tentang anak berkebutuhan khusus menjadi penyebab penolakan dari guru adanya kebijakan sekolah inklusi. Guru berasumsi dirinya tidak memiliki keterampilan untuk mengajar peserta didik dengan berbagai kebutuhan khusus, namun kebijakan telah menuntut mereka untuk menerima keberadaan dan mengajar anak berkebutuhan khusus di kelas mereka. Meskipun demikian 92% guru-guru sangat mendukung dan setuju jika anak yang berkebutuhan khusus mengikuti pelajaran di sekolah reguler, karena anak tersebut bisa bersosialisasi dengan peserta didik normal lainnya. Hal ini sejalan pendapat Wardani (2012) yang menyatakan bahwa sekolah inklusi juga memungkinkan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal, dan diperlakukan selayaknya anak normal. Penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah reguler memberikan dampak positif untuk anak berkebutuhan khusus baik dari segi psikologis, sosial, dan daya pikirnya. Mereka bisa mengembangkan kompetensi sosial dan kepercayaan dirinya. Maka sangat diperlukan dukungan dari semua pihak terutama sekolah penyelenggara, kurang lebih 90% peran kepala sekolah sangat mendukung penyelenggaraan program pendidikan inklusi berdasarkan data wawancara dengan kepala sekolah. Di samping itu guru juga menyatakan pendidikan inklusi bisa mencapai kesuksesan dengan memberikan pelatihan kepada guru-guru mengenai pendidikan inklusi.

Kendala Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar

Selain manfaat yang diperoleh dari penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus, ada kendala dihadapi dari penyelenggaraan sekolah inklusi secara penuh. Kendala tersebut berasal dari dalam maupun dari luar sekolah. Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

Sarana dan Prasarana

Berdasarkan wawancara hanya 45% sekolah yang cukup memadai sarana untuk pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak lepas dari sarana yang dimiliki sekolah. Kebutuhan sarana sesuai dengan kebutuhan peserta didik menjadi kendala pelaksanaan pembelajaran di kelas. Misalnya kelas fasilitas jalan khusus anak tuna daksa, alat bantu pendengaran untuk anak tuna rungu, buku/huruf braile untuk anak tuna netra, dan sarana lainnya (Saputra, 2016). Keterbatasan sarana yang dimiliki sekolah berdampak kepada kurangnya pelayanan yang diberikan bagi anak berkebutuhan khusus. Meskipun sekolah mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi namun minimnya biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana menjadi faktor kendala implemetasi pendidikan inklusi. Hal ini sejalan pendapat Ervianti (2018), suatu proses akan terlaksana sesuai dengan prosedur jika pengelolaannya sesuai dengan standar yang berlaku. Pengelolaan merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Pendidikan.

Kemampuan Guru dalam Mengajar dan Kurangnya Pelatihan

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh sekitar 72% guru belum pernah mengikuti pelatihan tentang pendidikan inklusi baik yang diadakan sekolah maupun pemerintah daerah. Faktor tersebut juga memberikan pengaruh terhadap pembelajaran yang diberikan guru dalam kelas. Kurangnya keterampilan dan pemahaman guru dalam mengajar anak berkebutuhan khusus menjadi salah satu kendala suksesnya pendidikan inklusi. Sekitar 80% guru mengatakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk peserta didik berkebutuhan khusus sama dengan peserta didik yang normal, hanya 10% guru yang melakukan modifikasi, itupun di kegiatan pembelajaran. Lebih kurang 50% guru melakukan pendekatan langsung terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dalam pembelajaran dengan menjelaskan materi secara berulang.

Penempatan Anak Berkebutuhan Khusus di Kelas

Penempatan peserta didik di kelas berdasarkan tes IQ yang dilakukan pada saat mereka masuk sekolah. Pihak sekolah menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan kelainan yang dimilikinya. Tetapi hampir 100% mereka ditempatkan di kelas normal/reguler bersama peserta didik normal lainnya. Jadi peserta didik berkebutuhan khusus belajar sepanjang hari dengan peserta didik normal, hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman peserta didik berkebutuhan khusus terhadap materi tertentu. Adapun model penempatan peserta didik berkebutuhan di Indonesia adalah kelas reguler (inklusi penuh), kelas regular dengan cluster, kelas reguler dengan pull out, kelas reguler dengan cluster dan pull out, dan kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Jika penempatan ABK sesuai dengan kelasnya, maka keberhasilan peserta didik berkebutuhan khusus bisa tercapai sepenuhnya (Baharun & Awwaliyah, 2018).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan sebagai berikut: (1) kelainan yang dimiliki peserta didik berkebutuhan khusus di 50 sekolah dasar yang tersebar di Sumatera Barat relatif sama yaitu lamban belajar dan tuna grahita ringan, (2) implementasi pendidikan inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah dasar Sumatera Barat kurang berjalan dengan baik, dan (3) kendala implemetasi pendidikan inklusi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah serta biaya untuk pengadaan sarana pendidikan inklusi relatif sedikit, pemahaman guru terhadap peserta didik berkebutuhan khusus masih sangat minim, dan penempatan peserta didik berkebutuhan khusus dikelas reguler tidak berpedoman kepada tipe-tipe kelas inklusi. Akibatnya, pemahaman peserta didik terhadap materi menjadi berpengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarsari, A. D. (2018). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Jenjang SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Sidoarjo. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 1(2), 91–104. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v1n2.p91-104>
- Baharun, H., & Awwaliyah, R. (2018). Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Epistemologi Islam. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 5(1), 57–71. <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/209>
- dapodik.kab.bungo. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/100200>
- Takola.Pklk.Kemdikbud.Go.Id. <http://takola.pklk.kemdikbud.go.id/abi/index.php/>

- Ervianti, E. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi di SD Negeri Kalukuang III Kota Makassar [Universitas Negeri Makassar].
<http://pustaka.unm.ac.id/opac/detail-opac?id=47180>
- Harahap, D., & Hastina, N. (2017). Implementasi Pendidikan Inklusif SDN No. 067261 Medan Marelan. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu UNA 2017*, 1119–1125.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/reuk2>
- Husen, H. B. (2018). Pendidikan Inklusi Anak Berkebutuhan Khusus. FKIP Universitas Bung Hatta.
- Mieghem, A. Van, Verschueren, K., Petry, K., & Struyf, E. (2018). An Analysis of Research on Inclusive Education: A Systematic Search and Meta Review. *International Journal of Inclusive Education*, 24(6), 675–689.
<https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1482012>
- Nazir, M. R. S. (2009). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia.
- Pratiwi, J.C.(2015). Sekolah Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Tanggapan terhadap Tantangan Kedepannya. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan “Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi,”* 237– 242.
<https://media.neliti.com/media/publications/172228-ID-sekolah-inklusi-untuk-anak-berkebutuhan.pdf>
- Rasmitadila.(2020). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Raja Grafindo Persada. Riadin, A., Misyanto, M., & Usop, D. S. (2017). Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Negeri (Inklusi)diKota Palangka Raya. *Anterior Jurnal*, 17(1), 22–27.
<https://doi.org/10.33084/anterior.v17i1.17>
- Saloviita, T. (2020). Attitudes of Teachers Towards Inclusive Education in Finland. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 64(2), 270–282.
<https://doi.org/10.1080/00313831.2018.1541819>
- Saputra, A. (2016). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Golden Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(3), 1–14. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/goldenage/article/view/1929>
- Taufan, J., & Mazhud, F. (2014). Kebijakan-Kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah X Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Pendidikan UPI*, 14(1), 62–75.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/3213>
- Wardani, I.G.A.(2012). Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Universitas terbuka.
- Zabeli, N., Shehu, B. P., & Anderson, J. A. (2020). The The Understanding of Inclusive Education in Kosovo: Legal and Empirical Argumentation. *Center for Educational Policy Studies Journal*, 1–21. <https://doi.org/10.26529/cepsj.692>